

Judul : Bertanggung jawab ke Presiden, BUK Migas percepat pengelolaan Migas
Tanggal : Rabu, 23 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Bertanggung Jawab Ke Presiden BUK Migas Percepat Pengelolaan Migas

FOTO: FRANSIS GOLKAR.COM



Yulisman

ANGGOTA Komisi XII DPR Yulisman menyambut baik arah pengaturan Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUK Migas) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Karena penguatan kelembagaan pengelolaan migas menjadi bagian penting dalam pembenahan tata kelola migas nasional.

"Prinsipnya, kelembagaan yang dibentuk nantinya mampu memperkuat tata kelola, mempercepat pengambilan keputusan, dan memberikan kepastian bagi pengembangan industri migas nasional," kata Yulisman di Jakarta, Senin (21/9/2026).

Yulisman menjelaskan, BUK Migas telah menjadi salah satu substansi penting dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang telah disetujui menjadi inisiatif DPR. Karena itu, pandangan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengenai posisi BUK Migas yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden menjadi bagian penting untuk didalami dalam pembahasan beleid tersebut bersama Pemerintah. "Masih ada berbagai aspek yang perlu kita bahas secara komprehensif," kata politisi Golkar ini.

DPR, kata Yulisman, ingin mendapatkan desain kelembagaan yang benar-benar mampu menjawab kebutuhan pengelolaan migas Indonesia ke depan. Juga memberikan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan.

Ia berharap keberadaan BUK Migas nantinya dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, mempercepat penyelesaian berbagai hambatan perizinan, serta mendukung peningkatan investasi, eksplorasi, dan lifting migas nasional.

Jangan sampai persoalan koordinasi dan panjangnya proses perizinan menghambat investasi dan peningkatan produksi. "Karena itu, pembagian kewenangan dan hubungan BUK Migas dengan kementerian serta lembaga terkait perlu dirumuskan secara jelas," tandas legislator asal Riau ini.

Agar penguatan tata kelola migas memberikan manfaat yang semakin besar bagi daerah penghasil, Yulisman berharap, peningkatan investasi dan produksi berjalan beriringan dengan keterlibatan daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pelaku usaha lokal, serta peningkatan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi. "Tujuan besarnya adalah memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi nasional," tandasnya.

Ke depan, Yulisman berharap, pembahasan RUU Migas menghasilkan pengaturan BUK Migas yang efektif, profesional, transparan, serta mampu mendorong investasi dan peningkatan produksi migas nasional.

Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi menambahkan, dalam pasal 5 ayat (3) draf RUU Migas yang telah diserahkan ke Pemerintah ditegaskan bahwa BUK bertanggung jawab kepada Presiden. ■ TIF